

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2021, Rusia memulai pengumpulan pasukan militer secara masif di sepanjang perbatasan Ukraina. Beberapa bulan berikutnya, pasukan tambahan serta peralatan militer telah dikirim ke Belarusia, Moldova, dan Krimea. Analisis pertahanan barat memperhatikan pada Februari 2022, sebanyak 190.000 tentara Rusia telah mengepung Ukraina. Namun, Putin menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan mengonfirmasi bahwa penumpukan pasukan dan peralatan militer di Laut Hitam adalah latihan yang sebelumnya telah dijadwalkan.¹

Kondisi kedua belah pihak semakin memanas ketika Zelenskyy memberikan pidato yang berapi-api di *Munich Security Conference* dengan pernyataan bahwa Ukraina harus memiliki jalan yang jelas untuk bergabung dengan NATO. Ukraina menyesal telah menyerahkan persenjataan nuklirnya kepada Uni Soviet yang saat itu menjadi persenjataan terbesar ketiga di dunia. Berdasarkan pada laporan dari pengamat *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE), Ukraina telah meningkatkan penembakan terhadap wilayah Donetsk dan Luhansk yang dinilai telah mendapat persetujuan dari Amerika Serikat (AS) dan NATO.²

¹ Michael Ray, "Russia-Ukraine War | Casualties, Map, Causes, & Significance," *Britannica*, diakses Januari 9, 2024,

<https://www.britannica.com/event/2022-Russian-invasion-of-Ukraine#ref354585>.

² Robert H. Wade, "Why the US and Nato have long wanted Russia to attack Ukraine," *The London School of Economics and Political Science*, diakses Juni 30, 2024,

<https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/03/30/why-the-us-and-nato-have-long-wanted-russia-to-attack-ukraine/>.

Dalam merespons sikap Zelenskyy, Putin mengakui kemerdekaan republik rakyat Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah independen. Setelah itu, Putin kemudian mengarahkan pasukan Rusia untuk masuk ke wilayah Ukraina dengan alasan sebagai penjaga perdamaian. Pada dini hari tepatnya tanggal 24 Februari 2022, Zelenskyy berpidato dengan bahasa Rusia untuk menyampaikan harapan akan perdamaian tetapi bersumpah bahwa Ukraina akan mempertahankan diri.

Bertepatan pada tanggal tersebut, sekitar pukul 06:00 pagi waktu Moskow, Putin mengumumkan dimulainya “special military operation”. Dalam hitungan beberapa saat, terdengar suara ledakan di beberapa kota besar seperti Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odesa, Sumy, dan Kyiv. Pemimpin dunia dalam memandang situasi tersebut langsung mengutuk serangan yang tidak beralasan dan menjanjikan kepada dunia bahwa akan ada sanksi yang berat serta cepat untuk tindakan Rusia. Zelenskyy kemudian mengumumkan darurat militer dan menyerukan mobilisasi umum masyarakat Ukraina.

Berdasarkan pada laporan yang dipublikasikan oleh *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, terdapat 9,614 korban yang meninggal dunia sejak invasi terjadi per September 2023.³ Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina yaitu Leonid Tymchenko, melaporkan bahwa lebih dari 26.000 masyarakat hilang sejak invasi Rusia di tahun 2022. Jumlahnya terdiri dari 15.000 personel militer dan 11.000 warga sipil. Jumlah masyarakat yang hilang bisa bertambah secara resmi dan sulit diperkirakan karena militer Rusia masih

³ Statista Research Department, “Russia-Ukraine war 2022-2024 - statistics & facts,” *Statista*, diakses Januari 2, 2024, <https://www.statista.com/topics/9087/russia-ukraine-war-2022/#topicOverview>.

menduduki sekitar seperlima wilayah Ukraina dan tidak ada pihak resmi yang secara konsisten mempublikasikan data mengenai korban militer invasi.⁴

Operasi khusus tersebut ditanggapi oleh Indonesia dengan landasan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, dan terpenting lagi penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan suatu negara, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan sikap Indonesia sudah tegas dalam memposisikan diri pada konflik kedua negara tanpa menyinggung salah satu pihak.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melakukan rapat dengan Komisi 1 pada 25 Februari 2022 bersama Kemlu RI mengenai evakuasi segera WNI di Ukraina. DPR juga memiliki gugus tugasnya sendiri untuk mempromosikan resolusi perdamaian dunia dengan mengamankan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. BKSAP sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak dari diplomasi parlemen, memperjuangkan berbagai resolusi yang bermanfaat dan tentunya sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Diplomasi parlemen yang didorong oleh BKSAP berbeda dengan diplomasi lembaga eksekutif. Secara praktik, diplomasi parlemen menggunakan pendekatan personal yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. Parlemen dapat menjangkau pembahasan tertentu dimana lembaga eksekutif tidak dapat menjangkaunya hingga

⁴ Juan Medina, "Deadly Russian Missile Attack on Hroza 'No Blind Strike', Zelenskyy Says," *France 24*, diakses Januari 2, 2024, <https://www.france24.com/en/europe/20231005-ukraine-downs-24-russia-launched-drones-says-ukrainian-general-staff>.

begitu dalam. DPR juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan lobi kepada kedua negara agar perdamaian dapat terjadi dan ketegangan dapat teratasi.

Agenda tersebut juga didorong karena Indonesia memegang presidensi G20 dimana hal ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuktikan peran aktif di mata dunia sebagai *peace bridger* untuk negara berkonflik. Hal tersebut yang membuat *pending matters* yang dirasakan oleh negara sahabat dapat di-*counter* oleh BKSAP. BKSAP baik dari elemen pimpinan maupun anggota mendorong untuk terciptanya resolusi damai dengan tidak merugikan bangsa sendiri. BKSAP menjalin komunikasi yang intens terhadap kedua negara melalui forum internasional seperti forum *the 8th Group of 20 Parliamentary Speakers Summit* (P20) dan *Courtesy Call* (CC) bersama dengan 2 negara yang berkonflik.

DPR RI ikut berpartisipasi aktif dengan organisasi parlemen internasional yaitu *Inter-Parliamentary Union* (IPU). IPU merupakan organisasi internasional yang beranggotakan parlemen dari negara-negara dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama antar parlemen, prinsip demokrasi yang representatif, dan memfasilitasi forum anggota parlemen untuk membahas isu tertentu. Dengan 180 parlemen yang bergabung sebagai anggota IPU dari 193 negara di dunia, IPU semakin mendekati keanggotaan universal. IPU terbentuk dengan komitmen untuk mempromosikan demokrasi, kesetaraan, hak asasi manusia, dan perdamaian.⁵ Komitmen tersebut dijalankan untuk perdamaian Rusia-Ukraina pada Sidang

⁵ Staff IPU, "Members," *IPU*, diakses Agustus 1, 2024, <https://www.ipu.org/about-ipu/members>.

Umum IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali dengan menghadirkan resolusi yaitu pembentukan IPU *Task Force*.⁶

Pembentukan gugus tugas tersebut bertujuan untuk menjalankan misi dalam mengakhiri konflik dengan tetap mengedepankan pada aspek dialog diplomatik dan diplomasi parlemen. Pelaksanaan tugas IPU *Task Force* dimulai dengan kunjungan ke Kyiv serta Moskow pada Juli 2022 lalu dan berdialog dengan parlemen kedua negara. BKSAP yang juga merupakan inisiator sekaligus anggota dari IPU *Task Force* berharap agar gugus tugas tersebut dapat menghadirkan kedua negara berkonflik di meja perundingan serta mengakhiri tindak kekerasan terhadap kemanusiaan dan mengembalikan kestabilan pangan serta ekonomi global.

BKSAP DPR RI berupaya untuk membantu kepentingan nasional Indonesia dengan ikut berkolaborasi bersama lembaga eksekutif baik presiden maupun Kemlu dalam menghadirkan resolusi konflik. Pencapaian agenda nasional dan internasional ikut ditingkatkan melalui peranan secara internal dalam lingkup pemerintahan Indonesia serta menjalin kerja sama yang baik di forum regional maupun internasional. Hal ini menjadi landasan bagi peneliti untuk melihat bagaimana proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh parlemen Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional dengan tetap berpedoman pada politik bebas aktif serta bagaimana kesamaan kepentingan yang terimplikasi terhadap harmonisasi di IPU dalam menghadirkan resolusi yang damai dan tidak merugikan kedua belah pihak.

⁶ BKSAP DPR RI, "Fadli Zon Harap IPU Task Force Hadirkan Rusia-Ukraina di Meja Perundingan," *DPR RI*, diakses Januari 3, 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik Rusia-Ukraina telah menjadi sorotan dunia internasional karena dampaknya yang inklusif serta kompleksitas hubungan kedua negara. Konflik tersebut berdampak terhadap tatanan internasional sehingga negara-negara khawatir mengenai stabilitas politik, keamanan regional serta hak asasi manusia. Hadirnya DPR RI sebagai lembaga legislatif secara praktis dapat berperan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dengan harmonisasi bersama IPU sebagai wadah dari parlemen negara secara global. Jika secara umum lembaga eksekutif yaitu presiden maupun Kemlu menghadirkan resolusi terhadap konflik tertentu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran parlemen dalam menghadirkan resolusi konflik namun tetap sejalan dengan kepentingan nasional yang didorong oleh lembaga eksekutif. Urgensi lainnya juga mengenai bagaimana kerja sama parlemen Indonesia dengan IPU untuk menengahi konflik negara anggota dengan menggunakan kacamata lembaga legislatif.



1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dielaborasi pada rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang dapat diteliti adalah “Bagaimana peran parlemen Indonesia di IPU dalam menghadirkan resolusi terhadap konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022-2024?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggali serta menjelaskan secara mendalam peran dari diplomasi parlemen Indonesia di IPU sebagai *main*

actor dalam menghadirkan resolusi terhadap konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022-2024. Tujuan penelitian ini secara spesifik juga melibatkan beberapa aspek seperti mengidentifikasi dinamika dari konflik Rusia-Ukraina, menganalisis peran dari harmonisasi kerja sama parlemen Indonesia di IPU dalam penyelesaian konflik, menganalisis tantangan sekaligus peluang dari upaya diplomasi parlemen serta menjabarkan sejauh mana peran diplomasi parlemen dalam membawa perubahan positif terhadap situasi konflik.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat positif sebagai berikut.

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur rujukan dalam studi hubungan internasional, terkhusus dalam lingkup mengamati peran lembaga legislatif dalam resolusi konflik tertentu. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam pengembangan teori diplomasi parlemen yang secara mendalam menengahi konflik tertentu.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran analitis mengenai peran parlemen Indonesia di IPU dalam menghadirkan resolusi konflik tertentu. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi IPU maupun parlemen negara lain melalui keterlibatan aktif parlemen Indonesia dalam menghadirkan resolusi konflik tertentu.

1.6 Studi Pustaka

Dengan bervariasinya data yang peneliti riset, diharapkan dapat menjawab keraguan yang tercantum di penelitian ini. Data yang didapatkan berguna untuk

memberikan sumbangsih pemikiran sehingga melancarkan penelitian ini hingga akhir. Peneliti telah melakukan riset dengan lima karya tulis ilmiah dalam ranah nasional ataupun internasional yang relevan dan membantu penulis untuk menyelesaikan anomali penelitian. Adapun sekumpulan karya tulis ilmiah yang peneliti jadikan pondasi utama adalah sebagai berikut:

Pertama, peneliti merujuk pada artikel yang dilampirkan pada jurnal *Politica* dengan judul “Articulation of Indonesia's Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflict”. Artikel yang ditulis oleh Isep Parid Yahya ini, menggambarkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina. Artikel ini membahas sikap Indonesia sebagai negara netral dan non-aliansi sekaligus memperlihatkan sikap bipolarisasi Ukraina yang didukung oleh negara-negara Barat dan Rusia sendiri. Secara spesifik di bagian diplomasi parlemen, Indonesia memiliki 3 momentum penting dalam menyikapi konflik yang diawali dengan dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah untuk IPU *General Assembly*, P20 *Summit*, Presiden sekaligus tuan rumah AIPA *General Assembly*.

Artikel ini kemudian menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat diartikulasikan dalam beberapa perilaku strategis. Pertama, Indonesia menyikapi posisinya sebagai negara yang mendukung hukum internasional terutama kedaulatan dan integritas teritorial. 4 prinsip penting yang dilandaskan pada kedaulatan, *UN Charter*, hukum internasional, dan kemanusiaan. Kedua, Indonesia menyikapi posisinya sebagai negara dengan perilaku politik luar negeri yang integrasionis. Ketiga, Indonesia telah mengimplementasikan prinsip politik bebas aktif terhadap kedua negara. Terakhir, politik bebas aktif

dikonseptualisasikan sebagai proaktifnya Indonesia untuk kepentingan nasional.⁷ Melalui literatur ini, peneliti akan memaksimalkan substansi dari artikel sebagai bahan pendukung terhadap penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan lebih berfokus tentang peran Indonesia di forum internasional dalam mendorong resolusi konflik.

Kedua, peneliti merujuk pada artikel yang berjudul “Building Democratic and Responsible Global Governance: The Role of International Parliamentary Institutions”. Artikel yang dipublikasikan oleh Zlatko Šabič, menggambarkan bahwa sebuah lembaga parlemen internasional yang saat ini bernama IPU, telah memberikan peranan yang dinamis dan tentunya berpartisipasi aktif meski perlu untuk dievaluasi secara komprehensif. Lembaga parlemen internasional menjadi sorotan karena memiliki potensi sebagai kontributor untuk perdamaian dunia, tata kelola global dan kependudukan yang lebih demokratis, antusiasme, dan transparan. Meskipun demikian, beberapa berpendapat bahwa jika lembaga parlemen internasional mengambil langkah lebih jauh seperti halnya lembaga eksekutif, maka dinilai dapat mengurangi kontinuitas dari ingatan institusional yang sebagai lembaga legislatif. Beberapa penstudi menilai bahwa IPU menjadi bentuk dari jaringan transnasional dimana jaringan legislatif tersebut dapat mengatasi defisit demokrasi dan bahkan sebagai katalisator dari kerja sama regional.⁸

Artikel ini kemudian memberikan pemahaman bahwa lembaga parlemen internasional mengakumulasi lebih banyak fungsi dan bahkan dapat mendorong

⁷ Isep P Yahya, “Articulation of Indonesia’s Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflict,” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 (2023): 111–129.

⁸ Zlatko Šabič, “Building democratic and responsible global governance: The role of international parliamentary institutions,” *Parliamentary Affairs* 61, no. 2 (2008): 255–271.

terciptanya struktur internasional yang baru dengan melakukan mediasi bersama dengan parlemen dari negara lain. Lembaga parlemen juga dapat mengkoordinasikan konsultasi antar wilayah dan dapat melakukan konsolidasi kerja sama antar kawasan sehingga dinilai dapat menjadi efisien di kemudian hari bagi pemerintah untuk mendelegasikannya. Peran strategis lainnya seperti transparansi dan akuntabilitas, advokasi dan pengaruh, serta pembangunan hukum internasional. Meskipun demikian, pendokumentasian serta proses pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga parlemen masih terbatas. Melalui literatur ini, peneliti akan mengisi ruang seperti proses pekerjaan yang dilakukan oleh parlemen melalui pengumpulan data primer ataupun sekunder sehingga relevan untuk keabsahan penelitian.

Ketiga, peneliti merujuk pada artikel yang berjudul “The Role of Indonesian House of Representatives in Parliamentary Diplomacy to Resolve the Myanmar Humanitarian Crisis in 2017-2019”. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Alif Ridwan, Muhammad Farid, dan Ilmi Dwiastuti. Dalam tulisannya, penulis mencoba menjelaskan hal menarik mengenai parlemen Indonesia yaitu DPR RI dimana meskipun lembaga legislatif memiliki tugas untuk membuat Undang-Undang serta mengawasi lembaga eksekutif, sebuah legislator juga dapat bertindak seperti halnya eksekutor namun tidak sampai upayanya untuk menyamakan posisi sebagai lembaga eksekutif. Parlemen Indonesia tugasnya tidak terbatas pada bidang tertentu sehingga sebagai aktor negara yang non-eksekutif, kebijakan luar negeri pemerintah dapat dipengaruhi melalui strategi diplomasi parlemen. Parlemen Indonesia telah menegaskan kedudukannya yang tidak hanya berpengaruh di tingkat nasional tetapi juga internasional dimana parlemen Indonesia secara



proaktif berperan dan berkontribusi di berbagai agenda internasional yang salah satunya berperan aktif untuk mengikuti *IPU Assembly and related meetings*.⁹

Artikel ini menegaskan bahwa aktor negara non-eksekutif dapat mendorong aktor negara eksekutif dalam mengadopsi resolusi tingkat regional maupun internasional dan mendorong langkah tertentu untuk arah kebijakan luar negeri Indonesia. Proposal yang ditawarkan Indonesia kepada IPU mendapatkan suara sepekat sebanyak 1,027 dengan resolusi “Ending the Grave Human Crisis, Persecution and Violent Attacks on the Rohingyas as a Threat to International Peace and Security and Ensuring Their Unconditional and Safe Return to Their Homeland in Myanmar”.¹⁰ Upaya tersebut berhasil setelah Indonesia mulai mendorong resolusi sejak tahun 2017. Secara keseluruhan, *in case* parlemen Indonesia tidak memiliki tanggung jawab atas kasus tertentu, tetapi kedudukannya sebagai lembaga legislatif dapat mengeksplor titik temu untuk membangun suatu konsensus. Melalui literatur ini, peneliti terdorong untuk menganalisis peranan diplomasi parlemen Indonesia dengan kasus lain yaitu resolusi konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina.



Keempat, peneliti merujuk pada artikel yang berjudul “Indonesia Parliamentary Diplomacy: The Leadership of House Representatives Republic of Indonesia in ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2011- 2012”. Artikel yang dirancang melalui penelitian M. Jullyo Bagus Firdaus dan Megahnanda Alidyan Kresnawati, menggambarkan secara umum mengenai implementasi dari

⁹ Muhammad Alif Ridwan, Muhammad Farid, dan Ilmi Dwiastuti, “The Role of Indonesian House of Representatives in Parliamentary Diplomacy to Resolve the Myanmar Humanitarian Crisis in 2017-2019” 2, no. 2 (2022): 58–68.

¹⁰ Staff IPU, *Inter-Parliamentary Union-137th Assembly*, 2017.

diplomasi parlemen Indonesia di tingkat kawasan ketika Indonesia menjadi ketua dari AIPA. Praktik diplomasi parlemen yang diusung dan diupayakan oleh Indonesia di tingkat kawasan maupun internasional, telah menyoroti berbagai hal menarik dimana Indonesia dengan ideologi bebas aktif dapat mengimplementasikan diplomasi total yang kemudian berfungsi sebagai diplomasi multi-jalur. Praktik diplomasi tersebut mendorong semua elemen dan *stakeholders* menjalankan peran yang optimal, tidak hanya pemerintah tetapi juga non-pemerintah. Kepentingan nasional Indonesia tidak hanya terhenti oleh peranan lembaga eksekutif tetapi juga lembaga legislatif dimana DPR RI terbukti memiliki kesamaan sikap serta tindakan seperti halnya lembaga eksekutif Indonesia dalam bertindak di forum internasional dan bahkan dapat berperan strategis untuk mencapai kepentingan nasional.

Artikel ini menambahkan bahwa pemerintahan demokrasi yang berlandaskan pada Trias Politica, masih minim perhatian terhadap peran diplomasi yang dicapai selain dari fungsi eksekutif. Diplomasi parlemen yang terus didorong oleh DPR RI perlu menjadi pertimbangan dimana parlemen dapat menjadi *supporting system* diplomasi eksekutif. Menurut Lesley Master, parlemen dalam hubungan internasional terlibat dalam dua tingkatan yaitu diplomasi institusional dan pendekatan lobi dengan parlemen negara-negara. Selanjutnya, parlemen juga dapat mengkoordinasikan, memantau negosiasi internasional, mengawasi keputusan, dan memastikan kepatuhan negara dengan aturan hukum dan norma



internasional.¹¹ Melalui literatur ini, peneliti terdorong untuk menganalisis peran dari DPR RI yang potensial terhadap resolusi konflik.

Terakhir, peneliti merujuk pada artikel yang berjudul “Parliamentary Diplomacy in Making of Foreign Policy” yang ditulis oleh Durbek Sayfullaev. Selama perkembangan abad kedua puluh, pembuatan kebijakan luar negeri mengalami transformasi yang signifikan. Setelah Perang Dunia II, perkembangan sistem internasional mengalami kebutuhan yang kuat terkait kebijakan luar negeri yang multidimensi, transparan, dan kooperatif. Saat ini, banyak aktor dan lembaga yang terlibat dalam urusan luar negeri karena ide-ide demokrasi telah menang di sebagian besar dunia. *The United Nations World Summit 2005* telah menjadikan demokrasi sebagai nilai universal yang harus dilanjutkan. Selama kurun waktu yang lama, *foreign policy making* telah menjadi kompetensi eksklusif dari lembaga eksekutif pemerintah. Kebijakan dari eksekutif dinilai bersifat monopoli, sentralisme yang berasal dari keahlian, kerahasiaan, dan urgensi adalah prasyarat untuk urusan luar negeri negara.

Artikel ini kemudian menekankan terkait doktrin demokrasi yang memerlukan keterlibatan langsung terhadap publik dalam urusan internal dan eksternal negara. Hal tersebut disalurkan melalui badan perwakilan terpilih yaitu parlemen yang memiliki kapasitas sebagai perwakilan langsung warga negara. Pada waktu yang bersamaan, dengan kompleksitas sistem internasional saat ini, eksekutif tidak dapat lagi menjadi satu-satunya kepemimpinan yang mengambil tanggung jawab atas setiap kebijakan eksternal negara. Tanggung jawab tersebut dapat

¹¹ Muhammad Jullyo Bagus Firdaus dan Megahnanda Alidyan Kresnawati, “Indonesia Parliamentary Diplomacy: The Leadership of House Representatives Republic of Indonesia in ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2011-2012,” *Wimaya* 2, no. 02 (2021): 39–47.

dikolaborasikan dengan parlemen melalui klasifikasi diplomasi baru yaitu diplomasi parlemen sebagai perilaku dan metode negara untuk mempromosikan kepentingannya secara eksternal seperti negosiasi melalui pejabat di ibu kota dan luar negeri. Diplomasi parlemen menawarkan lebih banyak ruang untuk kerja sama dan transparansi sehingga penting bagi negara untuk meningkatkan peran parlemen dalam *foreign policy decision making* untuk memantau kegiatan eksternal negara agar lebih akuntabel, transparan dan ramah publik. Melalui literatur ini, peneliti terdorong untuk menyoroti peran diplomasi parlemen terhadap kontribusinya untuk rekonsiliasi nasional, mediasi, dan resolusi konflik.¹²

Selain literatur jurnal ataupun buku yang didapatkan, peneliti juga merujuk pada situs resmi DPR RI mengenai peran diplomasi parlemen. Salah satu penguat yang mendorong peran diplomasi parlemen penting untuk ditelusuri yaitu pernyataan yang diungkapkan oleh salah seorang Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sukamta. Sukamta menyampaikan bahwa peran parlemen dalam kancah global sangat penting dengan menjembatani isu-isu tertentu di negara yang tidak dapat ditempuh melalui jalur resmi protokol diplomasi pemerintah.¹³ Diplomasi pemerintah yang dimaksud yaitu cara diplomasi yang cenderung formal dan lebih kaku serta upaya diplomasi yang diturunkan langsung kepada parlemen untuk dibahas.

Kemudian, dengan banyaknya mitra Indonesia yang menggunakan sistem parlementer, membuat jalur parlemen lebih luwes terlepas dari kekakuan diplomasi.

¹² Durbek Sayfullaev, "Parliamentary Diplomacy in Making of Foreign Policy," *The Advanced Science Journal* 2016, no. 1 (2016): 52–54.

¹³ BKSAP DPR RI, "Diplomasi Parlemen Berperan Penting di Kancah Global," *DPR RI*, diakses Februari 27, 2024, [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48433/t/Diplomasi Parlemen Berperan Penting di Kancah Global](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48433/t/Diplomasi%20Parlemen%20Berperan%20Penting%20di%20Kancah%20Global).

Meskipun demikian, kedua jalur diplomasi saling melengkapi dengan tujuan kepentingan nasional Indonesia. Permasalahan lintas batas yang terus terjadi saat ini menjadikan upaya kolaborasi sebagai solusi yang berpeluang efektif sehingga peneliti melalui beberapa literatur bacaan, ingin menghubungkan upaya resolusi dengan teori hubungan internasional sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 *Parliamentary Diplomacy*

Pendekatan yang berkaitan pada penelitian ini yaitu diplomasi. Hasyim Djalal berpandangan bahwa "Diplomasi pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan kita dan jika mungkin mendukung pandangan kita, tanpa perlu menggunakan kekerasan". Sir Earnest Satow melalui buku yang berjudul "Guide to Diplomatic Practice" juga berpandangan bahwa diplomasi merupakan penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan sekumpulan negara berdaulat.¹⁴

Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan penyelesaian melalui strategi damai. Lain hal jika dalam situasi yang tidak mendapatkan mufakat, diplomasi mengizinkan penggunaan kekuatan nyata sebagai strategi untuk mencapai kepentingannya. Peran diplomasi terlihat jelas untuk:

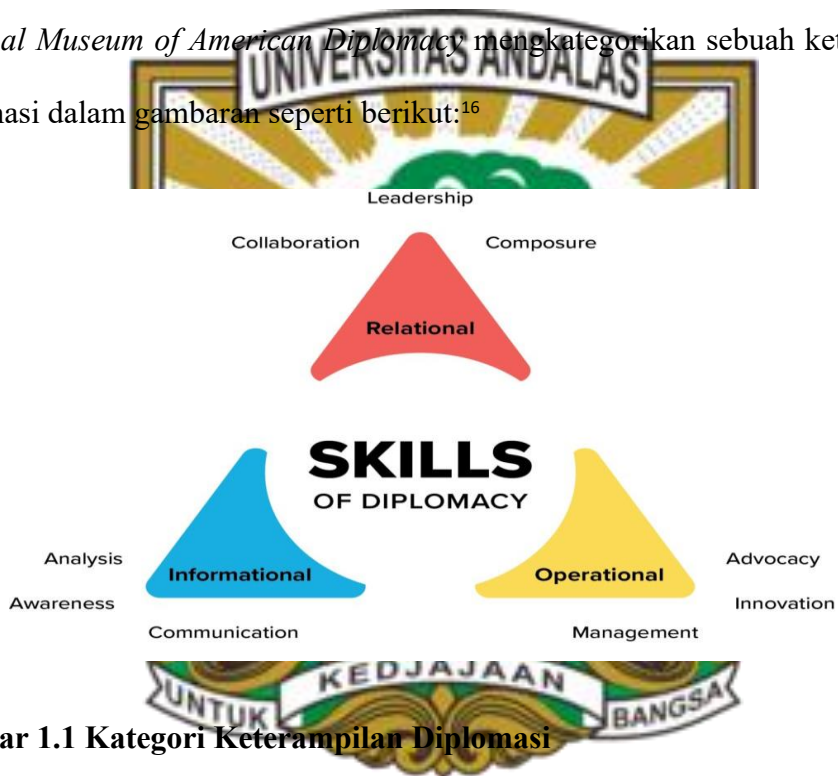
1. Membangun hubungan sesama individu (people to people)
2. Memperkuat proses yang kemudian membangun harmoni

¹⁴ Rendi Prayuda dan Rio Sundari, "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis," *Journal of Diplomacy and International Studies* 5, no. 2 (2019): 80–93.

3. Menyediakan forum untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan internasional
4. Kerja sama bisnis dan perdagangan internasional
5. Pengelolaan bencana dan kesehatan¹⁵

Diplomasi adalah sebuah keterampilan yang tidak hanya dikhususkan kepada duta besar tetapi setiap orang memiliki kapabilitas untuk melakukannya.

National Museum of American Diplomacy mengkategorikan sebuah keterampilan diplomasi dalam gambaran seperti berikut:¹⁶



Gambar 1.1 Kategori Keterampilan Diplomasi

Sumber: *National Museum of American Diplomacy*

Pada *Informational Skills*, bertujuan untuk mendekati sebuah situasi. Pada *Relational Skills*, bertujuan untuk bekerja dengan sukses bersama orang lain. Pada *Operational Skills*, bertujuan untuk mengambil sebuah tindakan. Tiga kategori

¹⁵ Aos Yuli Firdaus, "Multi-Track Diplomacy As Indonesia's Strategy in Mitigating the Covid-19 Pandemic," *Journal of Social Political Sciences JSPS* 1, no. 3 (2020): 168–177, www.WHO.org.

¹⁶ National Museum of American Diplomacy, "The Skills of Diplomacy," diplomacy.state.gov, diakses April 21, 2024, <https://diplomacy.state.gov/discover-diplomacy/the-skills-of-diplomacy/>.

tersebut dapat diperoleh dengan latihan dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan untuk setiap orang melakukan diplomasi.

Merujuk kepada 3 kategori dalam berdiplomasi yang dapat digunakan oleh setiap orang, hadir sebuah pendekatan diplomasi yang dapat dilakukan selain pemerintah eksekutif yaitu diplomasi parlemen. Parlemen berperan untuk membina hubungan baik dengan parlemen negara sahabat sambil terus mengoptimalkan kepentingan nasional. Parlemen bertugas untuk memastikan kesepakatan kerja sama internasional yang disepakati oleh pemerintah dengan negara sahabat ataupun organisasi antar pemerintah sehingga dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional agar terimplementasi secara maksimal. Hal tersebut yang memperlihatkan bahwa parlemen berperan untuk memperkuat diplomasi pemerintah.¹⁷

Diplomasi parlemen memiliki dua ciri khas yaitu yang pertama pengambilan keputusan di sidang parlemen internasional yang demokratis seperti di Sidang Umum IPU dan sidang terkait lainnya. Ciri khas kedua yaitu parlemen lebih dinamis dan transparan. Hal yang disoroti dalam kedudukan diplomasi parlemen yaitu ketika eksekutif sering kali harus berhati-hati dalam berdiplomasi terhadap suatu isu yang membutuhkan prosedur yang panjang, diplomasi parlemen dapat dilakukan secara langsung dan lebih terbuka.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan diplomasi parlemen dimana posisi dari pendekatan ini tidak berada di 9 *Tracks* diplomasi. Hal uniknya yaitu diplomasi parlemen dikategorikan sebagai aktor yang efektif dalam menggunakan diplomasi

¹⁷ Liza Faizah Rizqiah et al., "PERAN DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM," *PHENOMENON* 2, no. 1 (2024): 40–42.

¹⁸ Liza Faizah Rizqiah et al., "PERAN DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM," *PHENOMENON* 2, no. 1 (2024): 40–42.

jalur 1 ½ dengan lingkungan parlementer yang berhubungan secara reguler bersama aktor resmi dan memiliki tingkat legitimasi politik. Namun, di satu sisi, anggota parlemen merupakan wakil rakyat yang sebagian berasal dari organisasi akar rumput serta lembaga swadaya masyarakat sehingga memiliki tugas untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan kenegaraan yang telah dilakukan.¹⁹

Parlemen memiliki metodenya sendiri dalam urusan internasional dan tidak menganggap kedudukannya setara dengan kementerian luar negeri. Parlemen tidak bisa bertindak seperti negara yang memiliki layanan luar negeri yang berdedikasi tetapi parlemen memiliki sumber daya dengan pendekatan dialog, mediasi, dan persuasi. Ketika saluran tradisional tegang, parlemen menggunakan pendekatan persahabatan politik dan afiliasi untuk menjangkau lawan bicaranya.²⁰

Dari berbagai sumber yang mendefinisikan pendekatan diplomasi parlemen, penelitian ini merujuk kepada peran *European Parliament* (EP) yang dilakukan pada praktik politik luar negerinya. Peran tersebut terlihat dari publikasi oleh Daniel Fiott pada artikel yang berjudul “The Diplomatic Role of The European Parliament’s Parliamentary Groups”. EP telah menjadi badan parlementer yang memiliki karakter supranasional dengan kekuatan efektif yang nyata.²¹ EP telah membantu proses kebijakan luar negeri Uni Eropa dan terdapat peran spesifik yang dimainkan dalam diplomasi parlemennya.

¹⁹ Thomas Goumenos, “Parliamentary Diplomacy as ‘Track 1 1/2 Diplomacy’ in Conflict Resolution,” *E-International Relations* 12, no. 08 (2018): 4.

²⁰ Daniel Fiott, “On the Value of Parliamentary Diplomacy Madariaga,” *Madariaga Paper* 4, no. 7 (2011): 4.

²¹ Andres Malamud et al., “Parliaments and Parliamentarians,” *Polis (Santiago)* 10, no. 28 (2011): 113.

Peneliti merujuk kepada peran diplomatik yang dilakukan oleh EP untuk memberikan dukungan bulat terhadap *Common Foreign and Security Policy* (CFSP). Ada 3 peran diplomatik yang ditunjukkan:

1. *Legislative diplomacy*. Hal ini merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh partai politik yang menghimpun anggota parlemen untuk memengaruhi pelaksanaan kebijakan luar negeri melalui mekanisme kelembagaan dan legislatif.²²

Dalam ranah Indonesia, DPR RI pada periode 2019-2024, memiliki 9 Fraksi yang dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam dengan kelompok yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Pembentukan Fraksi memungkinkan terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan melalui koordinasi kegiatan Anggota sehingga memungkinkan Anggota Dewan untuk menjalankan tugas dan wewenang secara maksimal.²³

2. *Rhetorical diplomacy*. Hal ini merujuk kepada tindakan yang dilakukan parlemen untuk berdebat dan berdialog.²⁴ Bentuk dari debat dan dialog yang dilakukan oleh DPR RI dilakukan di berbagai jenis rapat seperti rapat paripurna, rapat komisi, rapat panitia kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan rapat Fraksi.²⁵ Diplomasi retorik juga memungkinkan parlemen untuk mendorong dialog dan debat dengan negara ketiga dalam mengembangkan representasi rakyat.

²² Daniel Fiott, "The Diplomatic Role of The European Parliament's Parliamentary Groups," *Swedish Institute for European Policy Studies* 1, no. 1 (2015): 4–5

²³ Staff Sekjen DPR RI, "Fraksi," *DPR RI*, diakses Agustus 21, 2024, dpr.go.id/tentang/fraksi.

²⁴ Daniel Fiott, "The Diplomatic Role of The European Parliament's Parliamentary Groups," *Swedish Institute for European Policy Studies* 1, no. 1 (2015): 5–6.

²⁵ Staff Sekjen DPR RI, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib* (Jakarta, 2020).

3. *Active diplomacy*. Hal ini merujuk kepada tindakan yang dilakukan anggota parlemen yang dikirim dengan tujuan misi ke negara ketiga. Bentuk diplomasi ini berbeda dengan *rhetorical diplomacy* yang berkaitan dengan kunjungan delegasi ke negara ketiga. Diplomasi ini memungkinkan parlemen untuk terlibat dalam kegiatan di negara ketiga seperti membuat perbedaan material, mereformasi parlemen dengan memperkuat kapasitas legislatif dan pengawasannya.²⁶

Berdasarkan 3 kategori peran diplomatik di atas, EP berperan untuk memberikan dukungan bulat terhadap tujuan CFSP. Sumber daya yang dimiliki parlemen berbentuk pengetahuan dan jika diperhatikan, banyak anggota parlemen yang merupakan mantan pejabat eksekutif. Karakteristik yang membuat diplomasi parlemen dapat memberikan peranan strategis yaitu tidak terikat erat dengan pemerintah dimana parlemen dapat meningkatkan legitimasi di pihak ketiga dalam situasi krisis dan menggunakan sumber daya yang berasal dari ideologis sehingga diplomasi ini menjadi pelengkap dari diplomasi tradisional.

Merujuk kepada penjelasan diplomasi parlemen, pendekatan tersebut dapat memberikan sumbangsih dalam memahami penelitian sebagai alat analisis. Relevansi dari konsep tersebut mengenai kerja sama antar parlemen serta peran diplomatik yang ditawarkan oleh parlemen dalam melengkapi diplomasi tradisional yang dilakukan oleh eksekutif ketika jaringan negosiasi terbatas. Diplomasi yang ditawarkan oleh aktor legislatif dapat menciptakan kesempatan untuk parlemen negara yang ingin terlibat dalam resolusi konflik mulai dari membangun dialog dan

²⁶ Daniel Fiott, "The Diplomatic Role of The European Parliament's Parliamentary Groups," *Swedish Institute for European Policy Studies* 1, no. 1 (2015): 6–7.

kepercayaan hingga solusi bersama dengan kedudukannya sebagai aktor yang adaptif terhadap diplomasi jalur 1 ataupun jalur 2.

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian pada isu hubungan internasional merujuk pada serangkaian arah yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, hingga menganalisis tentang fenomena yang diteliti di segala aspek kehidupan dalam tingkat internasional. Peneliti memahami bahwa metodologi penelitian menjadi cara untuk mengatur dan menganalisis data sehingga menghasilkan pengetahuan untuk menjawab penelitian. Metodologi menjadi proses yang tidak dapat dihindari karena terdapat komponen penting untuk menjawab penelitian dengan formulasi dan teknik analisis yang tepat. Hal yang dicari bukan pembenaran melainkan kebenaran yang diawali dengan pembentukan rumusan masalah sehingga menghasilkan hipotesis awal yang dibantu dengan perspektif dari literatur *review*. Dengan adanya hipotesis awal dari literatur yang digunakan, membantu peneliti untuk mengolah data dan menganalisis yang kemudian membentuk kesimpulan penelitian.

Fungsi dari metodologi penelitian ialah untuk memandu penelitian seperti panduan yang jelas tentang langkah yang harus dituliskan untuk penelitian, menyediakan data yang reliabel terhadap pertanyaan penelitian seperti mengelola temuan fakta yang dapat dijadikan referensi, dan mendukung pembangunan teori seperti mengembangkan teori yang ada sehingga relevan dengan pembelajaran hubungan internasional. Secara keseluruhan, metodologi tidak dapat dipisahkan dalam meneliti sebuah isu dan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dinamika hubungan internasional.



1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti rancang menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini akan diperkaya oleh analisis dari sekumpulan bahan bacaan, narasi yang dikembangkan hingga mendalam sehingga memudahkan peneliti untuk menjawab keraguan dari permasalahan penelitian. Pemilihan penelitian kualitatif juga dilandaskan pada ide bahwa metode tersebut dapat memberikan lebih banyak jawaban (eksplorasi) dan mendeskripsikan sejumlah variabel yang terkait dengan penelitian. Pendekatan kuantitatif yang mengedepankan angka secara statistik saat ini tidak dapat menerangkan kebenaran secara meyakinkan sehingga pendekatan kualitatif mampu untuk menerangkan fenomena sosial secara menyeluruh.²⁷

Dengan pertimbangan tersebut, peneliti mengedepankan pendekatan kualitatif yang analitis sehingga mampu untuk mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan penelitian, menganalisis secara seksama yang akan memudahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian seputar peran diplomasi parlemen Indonesia di IPU dalam resolusi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022-2023.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus terhadap proses peran diplomasi parlemen Indonesia melalui DPR RI di forum IPU dalam menengahi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022-2024. Selama konflik terjadi, terdapat banyak momentum dan dinamika politik yang terjadi baik di antara kedua negara yang berkonflik ataupun aktor internasional terkait lainnya yang turut hadir untuk menengahi kondisi. Dengan

²⁷ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2019): 128–138.

keberagaman dinamika tersebut, untuk menciptakan penelitian yang lebih konkrit dan terstruktur, peneliti menetapkan batasan penelitian ini mulai dari tahun 2022 sebagai awal mula operasi khusus yang dilancarkan oleh Rusia.

Pemilihan batasan pada tahun 2022 tersebut bertujuan agar penelitian ini tidak mengambang dan berfokus pada fenomena yang banyak dibicarakan dan dikecam oleh dunia pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut juga terjadi beberapa manuver politik yang berdekatan dengan konflik seperti contohnya G20 dimana Indonesia menjadi tuan rumah serta perhelatan IPU *Assembly* ke-144 yang dilaksanakan di Bali. Setelah itu, peneliti menetapkan 2024 sebagai titik akhir penelitian ini dengan landasan bahwa hingga saat ini, diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI di IPU masih berlangsung.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis dan unit eksplanasi menjadi komponen penting untuk diteliti. Keduanya memiliki perbedaan dimana unit analisis dalam penelitian termasuk dalam objek atau perilaku dari unit yang akan dideskripsikan. Unit analisis bersifat sebagai variabel dependen. Serkan Dolma berpendapat bahwa unit analisis mengacu pada proses penelitian yang akan menjadi landasan atas jawaban penelitian.²⁸ Pada penelitian ini, unit analisisnya yaitu diplomasi parlemen Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku dari aktor yang membuktikan bahwa adanya keinginan untuk memproyeksikan perdamaian dunia.

²⁸ Dolma Serkan, "The central role of the unit of analysis concept in research design," *Istanbul University Journal of the School of Business Administration* 39, no. 1 (2010): 169–174.

Sedangkan untuk unit eksplanasi, bersifat sebagai variabel independen karena unit ini berdampak terhadap unit analisis dan hendak diamati perilakunya. Unit eksplanasi juga mengacu pada tingkatan analisis yang akan digunakan untuk mendeskripsikan momentum dalam dinamika internasional. Pada penelitian ini, unit eksplanasinya yaitu resolusi konflik Rusia-Ukraina. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kedua negara berkonflik mengakibatkan timbulnya peran dari aktor internasional.

Setelah mengonsepan unit analisis serta unit eksplanasi dalam penelitian ini, elemen penting lainnya yang diperlukan ialah menentukan level analisis. Berdasarkan pada pandangan yang ditulis oleh Karen A. Mingst, Heather Elko McKibben, dan Ivan M. Arreguín-Toft di buku yang berjudul “Essentials of International Relations”, level analisis merujuk pada tiga tingkatan dan penting untuk mengidentifikasi ketiga perbedaan tersebut.²⁹

1. Individu

Pada tingkatan ini mencakup di dalamnya *personality*, *perceptions*, dan *choices*. Tingkatan individu menyoroti perilaku individu dalam dinamika hubungan internasional yang kemudian dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

²⁹ Karen A. Mingst, Heather Elko McKibben, dan Ivan M. Arreguin-Toft, *Essentials of International Relations*, W.W Norton, 2019.

2. Negara

Pada tingkatan ini mencakup di dalamnya *government, economy, national interest,* dan *interest groups*. Tingkatan negara menyoroti struktur pemerintahan dan faktor domestik lainnya yang dapat memengaruhi interaksi antara negara-negara.

3. Sistem internasional

Pada tingkatan ini mencakup di dalamnya *interdependence, international norms/rules, polarity,* dan *intergovernmental organizations*. Tingkatan sistem internasional menyoroti dinamika hubungan antar negara dalam sistem internasional secara inklusif dan membahas mengenai peran lembaga internasional.

Berdasarkan pada tingkatan tersebut, tingkat sistem internasional adalah jawaban atas penelitian ini dimana peneliti menyoroti peran dari Indonesia melalui DPR RI yang mendorong hadirnya resolusi konflik terhadap pertikaian yang terjadi di kedua negara. Resolusi didorong melalui pemanfaatan forum internasional yang menghimpun kedua parlemen negara sehingga tingkat ini relevan untuk digunakan. *Interdependence* juga terdapat pada penelitian ini karena melibatkan DPR RI di IPU melalui peran diplomasi parlemen.



1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sumber terpenting untuk mencari informasi terkait relevansi dari judul penelitian. Informasi yang relevan dengan teknik pengumpulan data yang baik akan mendorong penelitian berjalan dengan lancar.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proses akumulasi data yang bersifat sekunder (secondary

³⁰ Elizabeth Halcomb, "Understanding the importance of collecting qualitative data creatively," *Nurse Researcher* 23, no. 3 (2016): 6–7.

data), dengan teknik pengumpulan data yang variatif melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi melalui buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah hingga sumber tertulis baik yang tercetak maupun tercantum dalam bentuk elektronik.³¹

Menurut Zed, studi kepustakaan memiliki ciri sebagai berikut:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan
2. Data kepustakaan bersifat siap pakai yang artinya sumber penelitian telah tersedia di perpustakaan dalam bentuk cetak maupun elektronik
3. Data pustaka bukan data orisinal dan bersifat sebagai sumber sekunder
4. Kondisi dari data tidak terbatas oleh ruang serta waktu³²

Selain menggunakan studi kepustakaan, peneliti juga akan mengakumulasi data melalui metode wawancara dengan bertanya langsung kepada responden terkait dengan judul penelitian yaitu Tenaga Ahli maupun Anggota DPR RI yang terlibat di forum IPU untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Teknik wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi mengenai kejadian, peran individu maupun institusi, memproyeksikan peran yang diinginkan oleh keterlibatan aktor di penelitian serta memverifikasi beberapa hal yang peneliti dapatkan melalui metode studi kepustakaan. Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan

³¹ Marilyn L Guest, Greg; Namey Emily E.; Mitchell, *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*, 2013.

³² Ainul Azizah dan B. Purwoko, "Library Research of the Basic Theory and Practice of Narrative Counseling," *Jurnal BK UNESA* 7, no. 2 (2017): 1–8.

proses untuk mendapatkan keterangan mengenai dinamika yang terjadi di masyarakat dan dapat dipergunakan untuk banyak hal.³³

Untuk uraian secara lebih sistematis, peneliti kemudian mencoba mengumpulkan data dari situs resmi parlemen Indonesia seperti situs DPR RI dan BKSAP DPR RI yang memuat informasi lengkap mulai dari awal mula kejadian, proses diplomasi hingga proyeksi dari peran diplomasi yang didorong oleh parlemen Indonesia. Peneliti juga menambahkan sumber yang tercantum di situs resmi IPU yang sangat berguna untuk menambahkan serta menganalisis data secara mendalam sehingga memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Data dari media massa internasional juga akan peneliti gunakan sebagai sumber data karena dengan adanya studi kepustakaan, memungkinkan bagi peneliti untuk menjelajah lebih banyak sumber data yang ada dan membantu peneliti untuk menjawab keraguan yang masih terdapat selama proses penelitian. Sumber media akan berguna untuk melihat dari perspektif *pers* yang juga meliput kejadian secara langsung. Pengambilan data dari media massa akan berlangsung dengan terstruktur dimana peneliti melakukan *checks and balances* terhadap sumber yang ada dan kemudian melakukan verifikasi melalui teknik pengumpulan data yang ditentukan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang peneliti butuhkan karena meskipun peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mendorong studi kepustakaan, peneliti tetap ingin mempertahankan kualitas dari penelitian. Oleh

³³ Herdayati; Syahrial, "Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian" (n.d.).

karena itu, dibutuhkan teknik analisis data dari pendekatan kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas akademisnya.

Merujuk pada penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan peran diplomasi parlemen Indonesia dengan IPU dalam resolusi konflik Rusia-Ukraina tahun 2022-2024, maka diperlukan teknik analisis data yang relevan terhadap bukti peran diplomasi parlemen yang dilakukan. Peran diplomasi parlemen di IPU perlu untuk dipaparkan karena sejalan dengan kerangka konsep yang peneliti gunakan yaitu diplomasi parlemen. Data mengenai konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga perlu untuk peneliti gunakan sehingga berkaitan dengan peran diplomasi parlemen yang diberikan. Relevansi data tersebut juga harus sejalan dari latar belakang hingga kerangka konseptual yang peneliti coba bangun agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab I merupakan bagian pembuka dari penelitian dan menjadi awal untuk perkenalan penelitian kepada pembaca. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi uraian benang merah terhadap bahan penelitian. Peneliti juga mencantumkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terhimpun dalam dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis, studi pustaka yang terdiri atas lima literatur yang berbeda sumber, dan kerangka konseptual diplomasi parlemen. Kemudian, peneliti juga melampirkan bab ini dengan metodologi penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data,



serta teknik analisis data. Sistematika penulisan yang menjabarkan tentang rangkaian penelitian dari pendahuluan hingga penutup juga peneliti deskripsikan dalam bab ini. Secara keseluruhan, bab ini menjadi gambaran dasar kepada pembaca untuk dapat memahami permasalahan utama dalam penelitian ini.

BAB II Diplomasi Parlemen Indonesia di IPU

Bab II merupakan bagian penjelasan terkait unit analisis dan aktor utama dalam penelitian ini. Bab ini akan berfokus pada uraian mengenai profil dan *track record* dari diplomasi parlemen Indonesia serta kolaborasi yang dilakukan bersama dengan IPU. Peneliti berupaya untuk memproyeksikan aktor utama tersebut dengan penjelasan yang tersistematis mulai dari bagaimana sejarah terbentuknya diplomasi parlemen seperti landasan hukum dan faktor yang pendukung lainnya. Kemudian, peneliti akan menjabarkan beberapa konflik yang berhasil diresolusikan dengan diplomasi parlemen serta bagaimana kedudukan IPU sebagai wadah dalam menghimpun setiap diplomasi parlemen negara anggota.

BAB III Dinamika Konflik Rusia-Ukraina

Bab III merupakan bagian penjelasan terkait unit ekplanasi dalam penelitian ini yaitu dinamika yang melibatkan Rusia-Ukraina. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dinamika kedua negara sesuai dengan batasan penelitian yaitu pada tahun 2022 sebagai awal mula terjadinya dinamika yang panas. Penjelasan bab ini tidak hanya berfokus pada bagaimana kondisi dari kedua negara tetapi juga peneliti coba untuk uraikan mengenai respon internasional dalam menanggapi konflik yang terjadi. Secara keseluruhan, peneliti tentu juga akan menjabarkan data yang konkrit

mengenai kondisi konflik yang terjadi karena dinamika kedua negara tersebut menjadi faktor penting dalam penelitian ini.

BAB IV Peran Diplomasi Parlemen Indonesia di IPU dalam Resolusi Konflik Rusia-Ukraina

Bab IV adalah bagian pembuktian dalam penelitian ini. Bab ini akan dipenuhi dengan analisis yang peneliti uraikan terhadap peran diplomasi parlemen Indonesia di IPU dalam resolusi konflik Rusia-Ukraina. Analisis yang peneliti uraikan tidak terlepas dari pendekatan yang peneliti bangun dengan menggunakan pendekatan diplomasi parlemen yang dijelaskan pada artikel yang dipublikasikan oleh Daniel Fiott. Pada bab ini, akan memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang tercantum di bab I dan menjadi hasil analisis data kualitatif untuk dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

BAB V Penutup

Bab V merupakan bagian akhir dan penutup pada penelitian ini. Bab ini meliputi kesimpulan atas setiap pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya secara singkat, padat, dan jelas. Selain itu, bab ini juga akan mencantumkan saran dan rekomendasi yang peneliti tuliskan agar pembaca maupun peneliti lainnya dapat merefleksikan sela dalam penelitian ini. Terakhir, bab ini juga akan mencantumkan setiap daftar pustaka yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan sehingga penelitian ini tersusun dengan akademis melalui referensi konkrit yang relevan.

